

## GERAKAN RAKYAT YOGYAKARTA PADA MASA REVOLUSI

Oleh : Suratmin

Untuk memperoleh gambaran Gerakan rakyat Yogyakarta setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 kiranya terlebih dahulu diuraikan peristiwa bersejarah yang terjadi di Pegangsaan Timur 56 Jakarta karena peristiwa itulah yang kemudian menggerakkan bangsa Indonesia pada umumnya dan rakyat di Yogyakarta khususnya untuk menanggapi dan menindaklanjuti proklamasi.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 sejak pagi di rumah kediaman Soekarno (Bung Karno) sudah banyak berdatangan anggota masyarakat yang ingin menyaksikan peristiwa yang sangat bersejarah itu. Menjelang pukul 10.00 para pimpinan Indonesia seperti Dr. Buntaran, Mr. A.A. Maramis, Sayuti Melik, dan lain-lain sudah berdatangan. Terakhir kemudian Bung Hatta datang langsung masuk rumah kediaman Bung Karno. Tepat pukul 10.00 kemudian dinyatakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan pembacaan teks proklamasi yang dilakukan oleh Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta. Setelah itu dilakukan pengibaran Sang Merah Putih dan hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Setelah proklamasi itu kesibukan rakyat semakin meningkat, terutama para pemuda. Mereka menyebarkan pamflet-pamflet dan menginformasikan tentang peristiwa itu ke berbagai daerah. Tidak kalah sibuknya juga yakni para petugas di Kantor Berita Domei. Mereka berusaha agar berita proklamasi itu dapat disiarkan melalui *Morsecast Domei*. Berkat kerjasama yang kompak antara para pemuda dengan para petugas yang ada di Kantor Berita Domei antara lain Pengulu Lubis, Syahrudin, Rachmad Nasution, Asa Bafagih, Markonis Sugimin akhirnya berita proklamasi tersebut berhasil disirkan ke seluruh penjuru tanah air, bahkan sampai ke luar negeri.

Berita tentang proklamasi Indonesia yang disiarkan melalui berita Domei Jakarta tersebut ternyata berhasil juga sampai dan diterima oleh Kantor Berita Domei Yogyakarta, yang saat itu bertempat di Gedung Perpustakaan Negara bagian atas Jalan Malioboro Yogyakarta. Ketika berita tentang proklamasi akan disebarluaskan, terdengar *Gunseikan Bu* yang melarang disiarkannya berita proklamasi tersebut. mengingat berita itu sangat penting dan terlanjur diterima oleh para petugas dan wartawan dari Kantor Domei Yogyakarta yang berjiwa nasionalis, maka secara sembunyi-sembunyi berita proklamasi disebarluaskan, sekalipun hanya dari mulut ke mulut. Saat itu bertepatan dengan hari Jumat, maka pada waktu kesempatan sholat

Jumat sesudah sembahyang Jumat disampaikan berita proklamasi itu dan kemudian cepat tersebar luas di kalangan masyarakat sampai di desa-desa dan dusun.

Pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, Ki Hajar Dewantara dengan berkendara sepeda memimpin arak-arakan murid Taman Siswa untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Suasana di Yogyakarta menjadi semakin semarak. Rakyat menyambut berita proklamasi itu dengan penuh semangat dan kegembiraan.

Peristiwa proklamasi menjadi berita hangat tidak putus-putus dari satu tempat ke tempat lain. Berita proklamasi semakin meluas setelah bersama dengan Undang-Undang Dasar yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus dimuat dalam Harian Sinar Matahari di Yogyakarta yang terbit tanggal 19 Agustus 1945. rakyat Yogyakarta telah bersiap diri mengadakan gerakan dan langkah-langkah untuk mengantisipasi dan berjuang membela kemerdekaan Indonesia.

Tersiarnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta juga didengar oleh Sri Sultan Hamengku Buwana IX sebagai penguasa Kasultanan Yogyakarta dan juga oleh Sri Paduka Paku alam VIII sebagai penguasa Kadipaten Pakualaman. Sri Sultan maupun Sri Paku Alam cepat dan tanpa ragu-ragu lagi menanggapi proklamasi kemerdekaan dan pada tanggal 19 Agustus 1945 segera mengirim kawat kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta yang prinsipnya mengucapkan selamat atas berdirinya Negara Republik Indonesia dan terpilihnya keduanya sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Di samping itu, Sri Sultan berkenan pula memberi sambutan atas pernyataan kemerdekaan Indonesia sebagaimana termuat dalam Harian Sinar Matahari tanggal 20 Agustus 1945 yang isinya antara lain sebagai berikut :

“Sekarang kemerdekaan telah berada di tangan kita, telah kita genggam, nasib nusa dan bangsa adalah di tangan kita pula, tergantung pada kita sendiri. Kita harus menginsyafi bahwa lahirnya Indonesia Merdeka itu dalam masa kegentingan. Maka semua tiada kecualinya, harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing untuk kepentingan kita bersama, ialah menjaga, memelihara dan membela kemerdekaan nusa dan bangsa.

Sekarang bukan waktunya mengemukakan dan memperbesar segala pertentangan dan perselisihan paham. Tiap-tiap golongan harus mengesampingkan, sanggup untuk mencapai persatuan yang baru dan kokoh sehingga bangsa Indonesia mendapatkan senjata untuk memperjuangkan kemerdekaannya, untuk menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap angkatan-angkatan bangsa yang akan datang dan membuat sejarah yang gemilang.”

Pada tanggal 19 Agustus 1945 itu juga *Jogjakarta Hokokai* mengadakan sidang istimewa untuk menyambut pengumuman kemerdekaan Indonesia bertempat di Gedung Sonobudoyo. Sidang ini mengambil keputusan antara lain :

1. Melahirkan rasa gembira dan syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas lahirnya Negara Republik Indonesia.
2. Menyatakan dengan keyakinan seteguh-tegunya kepada Pemerintah Indonesia akan mengikuti dan tunduk pada tiap-tiap langkah dan perintahnya.
3. Mohon kepada ilahi agar negara Indonesia berdiri kokoh, teguh, dan abadi.

Untuk menindaklanjuti Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan emnjadikan kenyataan negara republik yang didirikan dengan bentuk Undang-Undang Dasar yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, maka pada tanggal 5 September 1945 Sri Sultan dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengeluarkan amanat seperti tertera di bawah ini :

AMANAT  
SRI PADOEKA INKGANG SINOEWON  
KANDJENG SOELTAN

Kami Hamengkoe Boewono IX, Soeltan Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat menjatakan :

1. Bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat jang bersifat Keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Repoeblik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekoesaan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat, dan oleh karena itoe berhoeboeng dengan keadaan pada dewasa ini segala oeroesan pemerintah dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat moelai saat ini berada di tangan kami dan kekoesaan-kekoesaan lainnya kami pegang seloeroehnja.
3. Bahwa perhoeboengan antara Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Poesat Negara Repoeblik Indonesia, bersifat langsoeng dan kami bertanggungjawab atas negeri kami langsoeng kepada Presiden Repoeblik Indonesia.

Kami perintahkan soepaja segenap pendoedoek dalam negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini.

Ngajogjakarta Hadiningrat  
28 Poeasa Ehe 1876  
(5-9-1945)

Hamengkoe Boewana

AMANAT  
SRI PADOEKA KANGDJENG GOESTI  
PENGARAN ADIPATI ARIO PAKEO ALAM

Sri Pakoe Alam VIII Kepada Negeri Pakoe Alaman, Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat, menjatakan :

1. Bahwa Negeri Pakoe Alaman jang bersifat Keradjaan adalah daerah istimewa dari Negeri Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekoesaan dalam Negeri Pakoe alaman, dan oleh karena itoe berhoeboeng dengan keadaan pada dewasa ini segala oeroesan pemerintah dalam Negeri Pakoe Alaman moelai saat ini berada di tangan kami dan kekoesaan-kekoesaan lainnya kami pegang seloeroehnja.
3. Bahwa perhoeboengan antara Negeri Pakoe Alaman dengan Pemerintah Poesat Negara Repoeblik Indonesia bersifat langsoeng kepada Presiden Repoeblik Indonesia.

Kami memerintahkan soepaja segenap pendoedoek dalam negeri Pakoe Alaman mengindahkan amanat kami ini.

Pakoe Alaman  
28 Poeasa Ehe 1876  
(5-9-1945)

Pakoe Alam VIII

Dengan amanat-amanat tadi Sri Paduka Sultan Hamengku Buwana IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bermaksud mengisi proklamasi 17 Agustus 1945 untuk menjadikan kenyataan bahwa semua kekuasaan pemerintah ada di tangan bangsa sendiri. Baik Sri Sultan Hamengku Buwana IX maupun Sri Paku Alam VIII telah merebut kekuasaan pemerintah bala tentara Jepang. Sejak saat itu tidak ada lagi pemerintah yang dualistis, asing, dan nasionalis melainkan hanya ada satu kekuasaan pemerintah nasional yang dipimpin oleh kedua Sri Paduka.

Dalam amanat kedua pemimpin tersebut, dengan tegas dinyatakan bahwa baik Kasultanan Yogyakarta maupun daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah seperti yang ditentukan dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasan resminya. Dengan dikeluarkannya pernyataan ini, maka rakyat tidak ragu-ragu lagi, baik rakyat di Kasultanan Yogyakarta, maupun rakyat di Pakualaman secara tegas memihak kepada Republik Indonesia. Apa yang dipertanyakan oleh rakyat telah terjawab bahwa dengan tegas beliau berdua menyatakan memihak kepada Republik. Dalam amanat itu juga ditegaskan bahwa semua kekuasaan dalam negeri Kasultanan dan Pakualaman masih dipegang sendiri oleh

Sultan dan Sri Paku Alam. Untuk segala sesuatunya baik Sri Sultan maupun Sri Paku Alam tidak mau diperintah oleh siapapun kecuali Presiden Republik Indonesia, sebab dengan demikian dapat dihindarkan praktek-praktek politik memecah belah dari kaum penjajah antara Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman dengan Republik Indonesia yang baru berdiri itu.

Kedua amanat yang disampaikan oleh Sri Sultan dan Sri Paku Alam tersebut merupakan suatu terobosan yang berani dan sangat strategis bagi perjuangan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Di sini memiliki nilai kesetiaan dan persatuan untuk menopang tegaknya Negara Republik Indonesia. Bahkan, amanat tersebut juga telah berhasil mengobarkan dan membakar semangat perjuangan rakyat yang saat itu memang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan kemerdekaan Indonesia, karena pada saat itu masih kuat dengan segala persenjataannya. Dengan demikian ada keharmonisan dan sama arah serta tujuan antara kehendak rakyat dengan para pemimpin, baik pemimpin di pusat yakni Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta, maupun sikap Sri Sultan dan Sri Paku Alam di Yogyakarta.

Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwana IX dan Sri Paku Alam VIII itu ternyata mendapat sambutan positif dari pemerintah pusat di Jakarta, terbukti pada tanggal 6 September 1945 dua utusan dari pemerintah menteri-menteri negara Mr. Sartono dan Mr. Maramis datang di Yogyakarta untuk menyampaikan "Piagam Kedudukan", yaitu mengenai kedudukan Yogyakarta dalam lingkungan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno sendiri. Yang menarik dari Piagam Kedudukan ini adalah sudah ditandatangani oleh presiden pada tanggal 19 Agustus 1945. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat sangat respek terhadap tindakan pernyataan sikap serta dukungan Sri Sultan Hamengku Buwana IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII masing-masing sebagai penguasa Kasultanan Yogyakarta dan juga penguasa Pakualaman. Presiden pun secara spontan begitu menerima kawat ucapan selamat dari Sri Sultan dan Sri Paku Alam langsung membuat balasannya, sekalipun mengirimkannya baru pada tanggal 6 September 1945.

Piagam Kedudukan Sri Paduka tersebut bunyinya sebagai berikut :

Kami Presiden Republik Indonesia, menetapkan :

Ingkang Sinuhun Kangdjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Abdul Rachman Sajidin Panotogomo Kalipatullah ingkang kaping IX ing Ngajogyakarta Hadiningrat pada kedudukannya dengan kepertjajaan, bahwa Sri Paduka Kangdjeng Sultan akan mentjuraikan segala pikiran, tenaga, djiwa dan raga untuk keselamatan daerah Jogjakarta sebagai bagian dari pada Republik Indonesia.

Djakarta, 19 Agustus 1945  
Presiden Republik Indonesia

ttd.  
(Ir. Soekarno)

Piagam Kedudukan Sri Paduka Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII adalah sebagai berikut :

Kami Presiden Republik Indonesia, menetapkan :

Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam ingkang kaping VIII pada kedudukannja dengan kepertjajaan, bahwa Sri Paduka Kangjeng Gusti akan mentjurahan segala pikiran, tenaga, djiwa dan raga untuk keselamatan daerah Paku Alaman sebagai bagian dari pada Republik Indonesia.

Djakarta, 19 Agustus 1945  
Presiden Republik Indonesia

ttd.  
(Ir. Soekarno)

Sumber : Suratmin, *Menguak Perjuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Masyarakat Sejarawan Indonesia : 2000.